

# RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2023

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**





## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Renja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Amiin.

Benteng, September 2023

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub**

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19700726 199101 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II   EVALUASI RENJA-PD TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1. Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja-PD triwulan II Tahun 2023.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	22
BAB III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	30
BAB IV   PENUTUP .....	40





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD Dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun Berjalan.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	20
Tabel 2.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 .....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab X menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam pasal 273 ayat (2) disebutkan bahwa Renstra-PD dirumuskan kedalam rancangan renja kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun. Dokumen Renja-PD mempunyai peranan yang strategis, karena menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam prosesnya, penyusunan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dan merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai kedepan, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanggulangan Bencana, berkewajiban juga menyusun rencana Kerja. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah kebijakan perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dituntut mampu menjawab perkembangan lingkungan kerja baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2023 memuat program/kegiatan perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan organisasi, pemanfaatan teknologi Informasi kebencanaan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek perlindungan masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2023, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026;
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
39. Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 526).[ujuan](#)

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menempatkan program Penganggulangan Bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan.

➤ **Tujuan Internal:**

1. Memenuhi ketentuan peraturan tentang perencanaan
2. Menyediakan dokumen acuan bagi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pada setiap tahunnya yang bersumber baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.
3. Menjabarkan tentang gambaran umum, program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam masa sekarang dan yang ingin dicapai pada periode satu tahun ke depan, sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur di BPBD Kepulauan Selayar dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.
5. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan.

➤ **Tujuan Eksternal:**

1. Memberikan masukan-masukan terhadap upaya pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang berorientasi untuk Pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap bencana.
2. Memberikan arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan bencana, baik dalam kondisi pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
3. Memberikan gambaran bagi masyarakat dan pihak swasta daerah bahwa Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar memiliki *concern* yang



besar terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Mensinergikan program-program dan kegiatan penanggulangan bencana dengan program-program dan kegiatan lain yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman resiko bencana, baik di SKPD lain, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
5. Terwujudnya dukungan dari berbagai pihak baik dalam bentuk fasilitasi, sinkronisasi dan dukungan anggaran program penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. maka sistematika penyusunan RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 meliputi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

#### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2023

#### 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai kewenangan dalam Bidang penanggulangan bencana. Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023, mengacu dari Rencana Strategis tahun 2021 - 2026, dengan mempertimbangkan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 yaitu Mewujudkan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana Dengan sasaran utama yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan Dari sasaran tersebut dituangkan 4 indikator utama yaitu

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, telah memenuhi target kinerja ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program dan kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel 2.1 dibawah ini:



**Tabel 2.1**  
**LAPORAN EVALUASI TERHADAP RKPD**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi	Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun pelaksanaan Renja OPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2023 (%)	Unit OPD penang- gung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2023							
								I		II		III		IV							13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BPBD			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	78,5 Indeks	16,084,860,963	76,9 Indeks	2,429,486,300	77 Indeks	2,778,184,459																	
				Nilai SAKIP	BB Kategori		C Kategori		CC Kategori																		
				Laporan Keuangan sesuai SAP	sesuai Kategori		sesuai Kategori		sesuai Kategori																		
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	72,31 %	16.084.860.963	0,00 %	2.429.486.300	70,28 %	2.778.184.459																	
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	95,00 %		0,00 %		85,00 %																		
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen atau laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu	100,00%	121.220.000	20,18	20.160.000	100,00%	22.832.000	50,00%	10.027.000	7,14%	9.425.000	0,00%	0	0,00%	0	57,14%	19.452.000	31,79%	39.612.000	31,79 %	32,68%		BPBD	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	22,519,000	2	3,599,000	2	3,950,000	1	2,042,000	1	1,617,000	0	0	0	0	2	3,659,000	4	7,258,000	44,44 %	32,23%		BPBD	Tercapai
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5	11,171,000	1	2,071,000	1	2,936,000	1	2,606,000	0	330,000	0	0	0	0	1	2,936,000	2	5,007,000	40,00 %	44,82%		BPBD	Tercapai
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5	11,171,000	1	2,071,000	1	2,936,000	0	0	0	2,686,000	0	0	0	0	0	2,686,000	1	4,757,000	20,00 %	42,58%		BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5	11,171,000	1	2,071,000	1	2,936,000	1	2,606,000	0	330,000	0	0	0	0	1	2,936,000	2	5,007,000	40,00 %	44,82%		BPBD	Tercapai



				Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)																						
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5	11,171,000	1	2,071,000	1	2,936,000	0	0	0	2,306,000	0	0	0	0	0	2,306,000	1	4,377,000	20,00 %	39,18%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	24,900,000	1	3,900,000	1	3,750,000	0	538,000	0	1,143,000	0	0	0	0	0	1,681,000	1	5,581,000	20,00 %	22,41%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	21	29,117,000	4	4,377,000	4	3,388,000	4	2,235,000	0	1,013,000	0	0	0	0	4	3,248,000	8	7,625,000	38,10 %	26,19%	BPBD	Tercapai
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen atau laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	10.056.193.643	20,00	1.703.898.000	100,00%	1.791.797.459	0,00%	285.939.070	33,33%	642.361.601	0,00%	0	0,00%	0	33,33%	928.300.671	26,67%	2.632.198.671	26,67 %	26,17%	BPBD	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	95	9,980,693,643	19	1,693,998,000	19	1,776,147,459	0	283,735,070	0	638,174,601	0	0	0	0	0	921,909,671	19	2,615,907,671	20,00 %	26,21%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	59,500,000	1	7,200,000	1	11,342,000	0	1,648,000	0	2,145,000	0	0	0	0	0	3,793,000	1	10,993,000	20,00 %	18,48%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	16,000,000	1	2,700,000	1	4,308,000	0	556,000	1	2,042,000	0	0	0	0	1	2,598,000	2	5,298,000	40,00 %	33,11%	BPBD	Tercapai
		1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100,00%	48.500.000	6,67	3.000.000	100,00%	8.050.000	25,00%	2.689.000	25,00%	1.435.000	0,00%	0	0,00%	0	50,00%	4.124.000	16,67%	7.124.000	16,67 %	14,69%	BPBD	
		1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60	48,500,000	4	3,000,000	12	8,050,000	3	2,689,000	3	1,435,000	0	0	0	0	6	4,124,000	10	7,124,000	16,67 %	14,69%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	0	0,00	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BPBD	
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	1.683.585.000	20,00	220.314.000	100,00%	238.557.000	7,50%	78.440.875	7,50%	77.038.400	0,00%	0	0,00%	0	15,00%	155.479.275	23,00%	375.793.275	23,00 %	22,32%	BPBD	



		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	50,000,000	1	5,478,000	1	11,053,000	0	1,892,000	0	1,685,000	0	0	0	0	0	3,577,000	1	9,055,000	20,00 %	18,11%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	53,000,000	1	6,800,000	1	12,500,000	0	0	0	1,450,000	0	0	0	0	0	1,450,000	1	8,250,000	20,00 %	15,57%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	50	40,000,000	10	6,350,000	10	12,500,000	3	2,805,000	3	2,495,000	0	0	0	0	6	5,300,000	16	11,650,000	32,00 %	29,13%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	1,540,585,000	1	201,686,000	1	202,504,000	0	73,743,875	0	71,408,400	0	0	0	0	0	145,152,275	1	346,838,275	20,00 %	22,51%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100,00%	128.000.000	4,44	52.640.500	100,00%	75.048.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	4,44%	52.640.500	4,44%	41,13%	BPBD	
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	100	26,000,000	0	0	20	10,392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	45	102,000,000	4	52,640,500	9	64,656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	52,640,500	8,89%	51,61%	BPBD	Belum Tercapai	
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	2.742.600.500	20,00	195.796.800	100,00%	326.880.000	0,00%	43.520.423	0,00%	104.518.139	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	148.038.562	20,00%	343.835.362	20,00 %	12,54%	BPBD	
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	36,000,000	1	2,800,000	1	5,790,000	0	1,000,000	0	1,650,000	0	0	0	0	0	2,650,000	1	5,450,000	20,00 %	15,14%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	620,511,400	1	87,631,400	1	133,336,000	0	35,513,423	0	30,018,139	0	0	0	0	0	65,531,562	1	153,162,962	20,00 %	24,68%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	2,086,089,100	1	105,365,400	1	187,754,000	0	7,007,000	0	72,850,000	0	0	0	0	0	79,857,000	1	185,222,400	20,00 %	8,88%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%	1.304.761.820	20,00	233.677.000	100,00%	315.020.000	11,61%	56.576.500	13,39%	64.230.000	0,00%	0	0,00%	0	25,00%	120.806.500	25,00%	354.483.500	25,00 %	27,17%	BPBD	
		1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	215,423,615	1	40,000,000	1	40,950,000	0	10,701,500	0	17,220,000	0	0	0	0	0	27,921,500	1	67,921,500	20,00 %	31,53%	BPBD	Belum Tercapai



		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	100	905,000,000	20	131,370,000	20	191,190,000	5	34,324,000	5	38,511,000	0	0	0	0	10	72,835,000	30	204,205,000	30,00 %	22,56%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	98,000,000	14	30,507,000	14	19,420,000	3	4,261,000	4	2,950,000	0	0	0	0	7	7,211,000	21	37,718,000	30,00 %	38,49%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	86,338,205	1	31,800,000	1	63,460,000	0	7,290,000	0	5,549,000	0	0	0	0	0	12,839,000	1	44,639,000	20,00 %	51,70%	BPBD	Belum Tercapai
2	Meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan			Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	100 %	4,997,116,911	100 %	14,165,793,000	100 %	1,848,048,450																
				Persentase korban bencana yang tertangani	100 %		100 %		100 %																	
				Persentase penanganan pasca bencana	100 %		100 %		100 %																	
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan informasi bencana	100,00 %	4.997.116.911	0,00 %	14.165.793.000	100,00 %	1.848.048.450																
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00 %		0,00 %		100,00 %																	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 %		0,00 %		100,00 %																	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga Negara yang Memperoleh Layanan informasi rawan Bencana	100,00%	319.334.200	6,67	42.294.000	100,00%	440.890.000	0,00%	42.659.097	50,00%	118.499.520	0,00%	0,00%	0,00%	0	50,00%	161.158.617	15,33%	203.452.617	15,33 %	63,71%	BPBD	
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dokumen)	1	100,000,000	0	0	1	350,690,000	0	41,578,097	0	105,899,520	0	0	0	0	0	147,477,617	0	147,477,617	0,00%	147,48 %	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Orang)	375	219,334,200	50	42,294,000	65	90,200,000	0	1,081,000	65	12,600,000	0	0	0	0	65	13,681,000	115	55,975,000	30,67 %	25,52%	BPBD	Tercapai



		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	3.453.618,91	11,54	13.824.690,50	100,00%	1.052.233,45	44,00%	353.474,19	2,00%	357.460,95	0,00%	0	0,00%	0	46,00%	710.935,14	20,36%	14.535.625,68	20,36%	420,88%	BPBD	
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Unit)	742	129,500,000	0	0	145	133,270,000	145	133,270,000	0	0	0	0	0	0	145	133,270,000	145	133,270,000	19,54%	102,91%	BPBD	Tercapai
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dokumen)	5	463,379,750	1	112,901,000	1	155,320,000	0	64,698,000	0	38,600,000	0	0	0	0	0	103,298,000	1	216,199,000	20,00%	46,66%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Kawasan)	13	422,537,750	1	50,182,000	3	47,800,000	3	27,975,000	0	9,000,000	0	0	0	0	3	36,975,000	4	87,157,000	30,77%	20,63%	BPBD	Tercapai
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pasca Bencana (Laporan)	5	1,821,918,511	1	13,605,075,000	1	653,161,450	0	122,848,198	0	282,427,950	0	0	0	0	0	405,276,148	1	14,010,351,148	20,00%	768,99%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang)	200	616,282,900	20	56,532,500	10	62,682,000	2	4,683,000	1	27,433,000	0	0	0	0	3	32,116,000	23	88,648,500	11,50%	14,38%	BPBD	Belum Tercapai
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	1.224.163,800	17,50	298.808.500	100,00%	301.812.000	48,81%	98.790.902	12,62%	121.373.900	0,00%	0	0,00%	0	61,43%	220.164.802	28,25%	518.973.302	28,25%	42,39%	BPBD	
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	5	83,220,300	1	164,769,500	1	232,374,000	1	74,549,302	0	102,944,300	0	0	0	0	1	177,493,602	2	342,263,102	40,00%	411,27%	BPBD	Tercapai
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	200	460,618,000	30	50,090,500	30	42,278,000	20	16,732,000	10	13,176,000	0	0	0	0	30	29,908,000	60	79,998,500	30,00%	17,37%	BPBD	Tercapai
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	200	612,799,300	30	76,961,500	35	15,419,000	10	7,509,600	6	4,783,600	0	0	0	0	16	12,293,200	46	89,254,700	23,00%	14,57%	BPBD	Belum Tercapai



		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Laporan)	5	67,526,200	1	6,987,000	1	11,741,000	0	0	0	470,000	0	0	0	0	470,000	1	7,457,000	20,00 %	11,04 %	BPBD	Belum Tercapai			
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana	5,00Dokumen	0	0,00	0	5,00Dokumen	53.113.000	0,00%	14.784.298	0,00%	24.975.200	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	39.759.498	0,00%	39.759.498	0,00%	0,00%	BPBD			
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dokumen)	5	0	0	0	1	53,113,000	0	14,784,298	0	24,975,200	0	0	0	0	0	39,759,498	0	39,759,498	0,00%	0,00%	BPBD	Belum Tercapai		
Total Target (RP)									4,626,232,909			Total Realisasi (RP)									2,508,219,073							
Rata-rata capaian kinerja (%)																				35,71	54,22							
Predikat kinerja																				SR	R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:																												





Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di narasikan kesimpulan capaian kinerja tahun anggaran 2023 sampai dengan triwulan II berupa :

**1. Sub Kegiatan yang telah memenuhi target/telah dilaksanakan;**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (perjenis Bencana)
- 6) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 7) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 8) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/kota
- 9) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota

**2. Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target karena belum dilaksanakan;**

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**3. Sub Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan tidak ada.**

**2.2. Analisis kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II**

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun 2023, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Selayar berupa dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan bencana dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan. Berikut SPM dan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan salah satu OPD pengampu SPM yaitu Trantibumlinmas yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dasar pada sub urusan bencana berkomitmen untuk melakukan percepatan dalam pemenuhan dan penerapan SPM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada SPM pada pelayanan sub urusan bencana telah mencapai target setiap tahunnya, namun pencapaian target disini dapat diartikan bahwa target yang dicapai disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diberikan, namun untuk lebih optimalnya pencapaian target program masih sangat membutuhkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk memenuhi pelayanan dasar SPM. Oleh karena itu agar komitmen ini dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas dari seluruh *stakeholders* untuk mendukung pencapaian kinerja pelayanan SPM.

Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksana program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2023**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPBD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah			0,680	0,690	0,700	0,710	76,9	77	77,5	78	
2.	Nilai SAKIP Perangkat daerah			60,00 B	65,00 B	70,00 BB	75,00 BB	39,95 C	CC	70,00 B	75,00 BB	
3.	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
4.	Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana, tanggap bencana)			100%	100%	100%	100%	100%	63,71%	100%	100%	
5.	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat			100%	100%	100%	100%	99,61%	46,66%	100%	100%	
6.	Persentase korban bencana yang tertangani			100%	100%	100%	100%	98%	43,39%	100%	100%	
7.	Persentase penanganan pasca bencana			100%	100%	100%	100%	99,95%	76,99%	100%	100%	



8.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	
10.		Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	20,24%	100%	100%	
11.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	63,71%	100%	100%	
12.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	420,88%	100%	100%	
13.			Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	42,39%	100%	100%	



## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### a. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara geografis terletak di ujung selatan jazirah Sulawesi dan memanjang dari utara ke Selatan dan terdiri dari gugusan pulau-pulau (132 pulau), luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km<sup>2</sup>, terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut adalah 9.146,66 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai yaitu 670 km.

Kabupaten Kepulauan Selayar berpotensi terhadap bencana alam berupa tsunami, kecelakaan laut, angin kencang, abrasi pantai dan banjir. Hampir semua Desa dan Kelurahan sepanjang pantai barat dan timur serta 26 pulau berpenghuni pada 5 (lima) kecamatan yang berada di kepulauan, rawan terhadap bencana alam laut, berupa gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut dengan membangun infrastruktur yang tahan terhadap gangguan tersebut dan membuat tanggul hijau (penanaman Mangrove), pembangunan umum dan infrastruktur yang dibutuhkan dengan ketentuan teknis yang ramah gelombang pasang dilengkapi bangunan/tanaman penahan tsunami, jalan dan bangunan penyelamat.

Ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini untuk mencegah dampak dari pemanfaatan ruang yang tidak tepat pada daerah tertentu misalnya pemanfaatan kawasan longsor, pembangunan di daerah penyanggah/*buffer zone* (sempadan sungai, hutan bakau, dll). Dampak Pemanfaatan Ruang yang tidak tepat antara lain berakibat pada hilangnya fungsi lindung hidrolis

kawasan, menurunnya kemampuan peresapan air, ancaman banjir terhadap bangunan di bantaran sungai, hilangnya daerah *buffer*/penyanggah, dll.

Salah satu bentuk sinergitas program antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dengan pembangunan mitigasi bencana non fisik yang dibuat dalam bentuk penyusunan dokumen yang dinamakan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menganalisa tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah. Penyusunan kajian risiko bencana ini dapat membantu dalam mendukung analisa kejadian bencana, penentuan upaya penanggulangan bencana serta sebagai acuan dalam perencanaan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga integrasi dapat berjalan optimal.

#### **b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

1. Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
2. Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
3. Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
4. Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
5. Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan sembada;

6. Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

1. *Komponen legislasi*, mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota.
2. *Komponen kelembagaan*, terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok dan kewenangan badan penanggulangan dari tingkat nasional, sampai dengan kabupaten/kota.
3. *Komponen perencanaan*, terkait dengan program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu “mainstream” dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai perspektif dalam perencanaan.
4. *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan dan program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
5. *Pengembangan kapasitas*, disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam system penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya



terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok, dan fungsi BPBD.

Masalah yang ditemui sampai saat ini adalah belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multi dimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dan manajemen kebencanaan belum berfungsi secara optimal sehingga berdampak pada belum optimalnya pelayanan penanganan bencana kepada masyarakat.

**c. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang serta dengan memperhitungkan faktor-faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta stakeholder lainnya, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dicanangkan Visi Kabupaten Kepulauan Selayar **“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”**, dengan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan;
5. Meningkatkan pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan;
6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung/menyukseskan Visi/Misi Bupati tersebut khususnya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar, dituangkan dalam program kegiatan lima tahun ke depan, namun demikian pelaksanaannya masih terkendala pada:

1. Keterbatasan SDM Aparatur (baik dari segi kualitas maupun kuantitas)
2. Keterbatasan dari segi anggaran
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penanganan kebencanaan.
4. Keterbatasan SDM Masyarakat (relawan bencana) dalam hal pengetahuan penanganan kebencanaan.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mewujudkan misi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026, tercantum pada Misi 1 dan Misi 2 yaitu

1. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan yang mengandung makna tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
  2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang mengandung makna tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.
- d. **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah**



#### Tantangan

Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan penanggulangan bencana antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana.

Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan dan keseragaman data dan informasi serta tingkat risiko bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mengurangi risiko-risiko tersebut melalui program kegiatan akan terfokus dan sesuai dengan prioritas dengan melibatkan potensi, sumberdaya serta anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan bencana. Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar dikategorikan tinggi sesuai data Indeks Risiko Bencana Indonesia.
- b. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah saja;
- c. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
- d. koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar *stakeholders* belum optimal sehingga budaya akan sadar bencana masih belum terlaksana dengan baik;
- e. perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital ini yang menuntut penyebaran informasi bencana dan pelaporan informasi kebencanaan sudah menggunakan aplikasi berbasis elektronik sehingga sumber daya manusia kebencanaan sudah harus mampu memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni.

- f. Belum optimalnya kualitas sumber daya pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
- g. Sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal pemberian pendidikan dan pelatihan berbasis kebencanaan masih terbatas sehingga kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sangat luas.



#### Peluang

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai beberapa peluang untuk dapat dijadikan program yang penting dan prioritas, seperti berikut ini :

1. Adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 berserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan kalangan dunia usaha;
2. Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Kabupaten/Kota;
3. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penanggggulangan bencana melalui kementerian/lembaga teknis;
5. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus Bencana) oleh Pemerintah Pusat;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,



pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

7. Penyusunan aplikasi system informasi untuk menyimpan dan mengelola data kebencanaan baik kerawanan, kerentanan, kapasitas penanggulangan bencana secara baik;
8. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang/gladi kesiapsiagaan bencana secara periodik;
9. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana;
10. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP serta indikator kinerja dalam pengelolaan penanggulangan bencana.

#### **e. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui pengurangan risiko bencana dan peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Optimalisasi pelayanan informasi rawan bencana secara terintegrasi, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. Peningkatan peran dan fungsi lembaga terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Aktualisasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara menyeluruh.
- e. Peningkatan kapasitas SDM Kebencanaan sebagai aset/modal berharga yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui peningkatan kompetensinya.

### BAB III

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran 2023 merencanakan Program Kerja (Renja) sebanyak 2 (dua) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 4.626.232.909,- (Empat Milyar Enam Ratus Dua puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah)** yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

##### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

##### **c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

##### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
- 2) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- 1) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

**a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota**

- 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota;
- 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (per jenis Bencana).

**b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**

- 1) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 2) Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/kota;
- 3) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/kota.

**c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

- 1) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/kota;
- 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota;



- 3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota;
- 4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

**d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

- 1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
- 2) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

KODE				Urusan /Bidang Urusan/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Catat an Penti ng	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
							Semula	Menjadi	Renja 2023	Renja 2023 Perubahan				
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja  Persentase Capaian Kinerja Keuangan				3.172.306.159	2.778.184.459			3,057,102,905
		01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen atau Laporan perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja yang di selesaikan tepat waktu				22.860.000	22.832.000			25,115,200
		01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	2 Dokumen	2 Dokumen	4.300.000	3.950.000	DAU	2 Dokumen	4,345,000
		01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.936.000	DAU	1 Dokumen	3,229,600
		01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.936.000	DAU	1 Dokumen	3,229,600
		01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000	2.936.000	DAU	1 Dokumen	3,229,600
		01	2.01	0005	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	Kab.	1	1	2.100.000	2.936.000	DAU	1	3,229,600





					Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	Dokumen	Dokumen					Dokumen	
		01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Laporan	4.700.000	3.750.000	DAU		1 Laporan	4,125,000
		01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kepulauan Selayar	4 Laporan	4 Laporan	5.460.000	3.388.000	DAU		4 Laporan	3,726,800
		<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen atau Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan tepat waktu</b>				<b>2.019.104.154</b>	<b>1.791.797.459</b>				<b>1,972,077,205</b>
		01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kepulauan Selayar	19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.004.104.154	1.776.147.459	DAU		20 Orang/bulan	1,953,762,205
		01	2.02	0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	-	1.000.000	-	DAU		-	-
		01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000	11.342.000	DAU		1 Laporan	12,476,200
		01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	4.308.000	DAU		1 Dokumen	4,738,800
		<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang</b>	<b>Persentase Pemenuhan</b>				<b>7.500.000</b>	<b>8.050.000</b>				<b>8,855,000</b>



					<b>milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah</b>									
		01	2.03	0006	Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	12 Laporan	12 Laporan	7.500.000	8.050.000	DAU		12 Laporan	8,855,000
		<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>				<b>21.000.000</b>	<b>66.053.000</b>				<b>72,658,300</b>
		01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Kepulauan Selayar	10 Orang	5 Orang	21.000000	66.053.000	DAU		5 Orang	72,658,300
		<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>320.000.000</b>	<b>241.300.000</b>				<b>265,430,000</b>
		01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	1 Paket	10.000.000	8.240.000	DAU		1 Paket	9,064,000
		01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Paket	1 Paket	10.000.000	12.500.000	DAU		1 Paket	13,750,000
		01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	9.200.000	DAU		1 Dokumen	10,120,000
		01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Laporan	290.000.000	211.360.000	DAU		1 Laporan	232,496,000
		<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>				<b>36.000.000</b>	<b>77.656.000</b>				<b>85,421,600</b>
		01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	20 Unit	11.000.000	13.000.000	DAU		20 Unit	14,300,000



		01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	3 Unit	3 Unit	25.000.000	64.656.000	DAU		5 Unit	71,121,600
		<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa Penunjang Pemerintah daerah</b>				<b>507.003.800</b>	<b>307.596.000</b>				<b>338,355,600</b>
		01	2.08	0001	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan		5.000.000	5.790.000	DAU		1 Laporan	6,369,000
		01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan		120.000.000	133.252.000	DAU		1 Laporan	146,577,200
		01	2.08	0004	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan		382.003.800	168.554.000	DAU		1 Laporan	185,409,400
		<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>				<b>238.838.205</b>	<b>262.900.000</b>				<b>289,190,000</b>
		01	2.09	0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	1 Unit	40.000.000	38.630.000	DAU		1 Unit	42,493,000
		01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Kepulauan Selayar	20 Unit	20 Unit	170.000.000	137.120.000	DAU		20 Unit	150,832,000
		01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	1 Unit	15.000.000	23.690.000	DAU		20 Unit	26,059,000
		01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Kepulauan Selayar	1 Unit	1 Unit	13.838.205	63.460.000	DAU		1 Unit	69,806,000
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM</b>					<b>1.083.650.322</b>	<b>1.848.048.450</b>				<b>2,180,973,740</b>



					<b>PENANGGULANGA N BENCANA</b>										
1	05	03	2.01		<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>				<b>100.000.000</b>	<b>440.890.000</b>				<b>484,979,000</b>
1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	350.690.000	DAU		1 Dokumen	385,759,000
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis ancaman bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun	Kab. Kepulauan Selayar	-	100 Orang	-	90.200.000	DAU		100 Orang	99,220,000
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>				<b>384.984.750</b>	<b>393.372.000</b>				<b>564,709,200</b>
1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kawasan	1 Kawasan	50.000.000	47.800.000	DAU		2 Kawasan	52,580,000
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten/kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan Kapasitas teknis dan manajerialnya	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	15 Orang	121.605.000	56.982.000	DAU		30 Orang	62,680,200
1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah aparaturnya dan warga Negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	Kab. Kepulauan Selayar	20 Orang	-	50.000.000	-	DAU		-	-
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas)	Kab. Kepulauan Selayar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	93.379.750	155.320.000	DAU		1 Kegiatan	170,852,000



						kabupaten/kota yang tertangani									
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan penyelamatan diri bagi individu warga Negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Kepulauan Selayar	-	348 Unit	-	133.270.000	DAU		20 Unit	146,597,000
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Kepulauan Selayar	2 Kawasan	-	70.000.000	-	DAU		2 Kawasan	77,000,000
1	05	03	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>				<b>187.412.250</b>	<b>307.512.000</b>				<b>354,383,700</b>
1	05	03	2.03	0001	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah prioritas	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	-	14.655.000	-	DAU			-
1	05	03	2.03	0002	Respon cepat Darurat bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	16.240.000	237.749.000	DAU		1 Dokumen	261,523,900
1	05	03	2.03	0003	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	30 Orang	90.454.000	43.178.000	DAU		30 Orang	47,495,800
1	05	03	2.03	0004	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan	Kab. Kepulauan Selayar	30 Orang	30 Orang	54.182.950	20.584.000	DAU		30 Orang	22,642,400



					kabupaten/kota	evakuasi korban bencana									
1	05	03	2.03	0005	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Kab. Kepulauan Selayar	1 Laporan	1 Laporan	11.880.300	6.001.000	DAU		1 Laporan	6,601,100
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Penataan system dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Persentase warga Negara yang mendapatkan penataan system dasar penanggulangan bencana</b>				<b>411.253.322</b>	<b>706.274.450</b>				<b>776,901,840</b>
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah data dan informasi kebencanaan yang tersedia	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	54.362.500	53.113.000	DAU		1 Dokumen	58,424,300
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) kabupaten/kota yang dilegalkan	Kab. Kepulauan Selayar	1 Dokumen	1 Dokumen	356.890.822	653.161.450	DAU		1 Dokumen	718,477,540



## P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang menghubungkan antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
  - a) Melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan dalam penanggulangan bencana yang diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
  - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

## 1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Kepala Daerah, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, September 2023  
**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700726 199101 1 002





## PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah kebijakan, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.

Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan manifestasi tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Apabila dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang menghubungkan antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan






pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
  - a) Melaksanakan penyusunan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya agar senantiasa bekerja bersama sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menghasilkan formulasi kebijakan dalam penanggulangan bencana yang diimplementasikan dalam bentuk target kinerja dan realisasi sesuai kaidah dan aturan yang berlaku;
  - b) Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

## 1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Kepala Daerah, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023, dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, September 2023  
**KEPALA PELAKSANA BPBD,**  
  
**Drs. AHMAD ALIEFYANTO, MM.Pub**  
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19700726 199101 1 002

